

KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUB DAS BATANG MASUMAI BERKELANJUTAN

EMPOWERMENT COMMUNICATION BASED ON LOCAL WISDOM IN THE MANAGEMENT OF THE SUB-WATERSHED BATANG MASUMAI SUSTAINABLE

**Fuad Muchlis^{1*}, Elwamendri¹, Siti Kurniasih¹, Sunarti², Najla Anwar Fuadi², Mohd.
Zuhdi², Eva Achmad³**

Peneliti Pusat Unggulan Iptek Watershed Management and Hydropower (PUI-WAHYD)
Universitas Jambi

^{1*}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi

²Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi

³Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi

fuadm@unja.ac.id

ABSTRAK

Paradigma pembangunan selama ini, dimana upaya perbaikan kondisi ekosistem di berbagai DAS dilakukan dengan pendekatan *top-down*, harus dialihkan pada pelibatan masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai. Oleh karena itu, komunikasi pemberdayaan berbasis kearifan lokal sebagai upaya meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi masyarakat terhadap Sub DAS Batang Mesumai harus dilakukan dalam pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam dan fungsi kearifan lokal di sekitar Sub DAS Batang Mesumai, dan merumuskan strategi komunikasi pemberdayaan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Batang Mesumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mendeskripsikan kearifan lokal di wilayah studi yakni, adanya Hutan Adat sebagai penyangga Sub DAS Batang Mesumai, dan Barin. Kearifan lokal tersebut berfungsi dalam menjaga ekosistem sungai, menjaga sumber pangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Strategi Komunikasi Pemberdayaan untuk merestorasi sub DAS Batang Mesumai melalui Perencanaan komunikasi, Menyusun aksi dan strategi, Penggunaan komunikasi yang efektif, dan Penetapan teknik komunikasi secara partisipatif agar masyarakat siap dan berperan aktif dalam menghadapi tantangan degradasi sungai.

Kata kunci: komunikasi, pemberdayaan, kearifan lokal, daerah aliran sungai

ABSTRACT

The current development paradigm, where efforts to improve ecosystem conditions in various watersheds are carried out using a top-down approach, must be shifted to involving the community so that they play an active role in preserving rivers. Therefore, empowerment communication based on local wisdom as an effort to increase community understanding, skills and participation in the Sub-watershed Batang Mesumai must be carried out in sustainable watershed management. This research aims to describe the variety and function of local wisdom around the Sub-watershed Batang Mesumai, and formulate an empowerment communication strategy to encourage community involvement in the management of the Batang Mesumai Sub-watershed. This research uses a case study approach and is analyzed qualitatively. The research results describe local wisdom in the study area, namely, Hutan Adat as a buffer for the Batang Mesumai Sub-watershed and Barin. This local wisdom functions in protecting river ecosystems, protecting food sources, and improving the economic welfare of the community. Empowerment Communication Strategy to restore the Sub-watershed Batang

Mesumai through communication planning, developing actions and strategies, using effective communication, and determining participatory communication techniques so that the community is ready and plays an active role in facing the challenges of river degradation..

Keywords: communication, empowerment, local wisdom, watershed

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) memberi arti penting bagi masyarakat, terutama terkait jasa yang diberikan oleh suatu DAS sebagai fungsi hidrologi, utamanya dalam penyediaan sumber daya air dan ekologi. Air merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, untuk itu kelestarian sumber daya air harus tetap dilestarikan serta dijaga, baik secara kualitas maupun kuantitasnya (Kissan, 2021).

Air sungai seringkali digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, maka penting untuk melakukan pengelolaan yang berupa tindakan konservasi. Konservasi air sungai itu sendiri berfungsi untuk memelihara keberadaan, sifat dan fungsi, serta keberlanjutan dari sumber daya air sungai. Pengelolaan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik di masa sekarang maupun di masa yang mendatang. Saefatu (2023)

Kesalahan dalam mengelola DAS berdampak pada menurunnya mutu dan daya dukung sumber daya di bagian hulu (*on-site*) dan berakibat kerugian di wilayah hilirnya (*off-site*). Oleh karena itu, DAS mesti dikelola secara komprehensif dan tepat. Kesalahan dalam mengelola DAS akan menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis dan berdampak luas pada kebutuhan manusia.

Pengelolaan DAS sejatinya harus didasarkan pada hubungan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu. Pengelolaan diperlukan, baik apabila ketersediaan sumberdaya tidak mencukupi untuk pemenuhan seluruh kebutuhan, maupun jika ketersediaannya melimpah (Tejoyuwono, 1981). Mengingat pentingnya jasa Sub DAS Batang Mesumai bagi masyarakat, maka perlu dirumuskan dan dilakukan langkah-langkah nyata yang dapat mengatasi

degradasi sungai dan lingkungan di sekitar wilayah tersebut.

Pengelolaan sub DAS Batang Mesumai sangat terkait dengan masyarakat yang selama ini beraktivitas pada wilayah tersebut. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman, keterampilan dan rasa memiliki masyarakat terhadap sub DAS Batang Mesumai diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan DAS yang lestari dan berkelanjutan. Paradigma pembangunan selama ini, dimana upaya memperbaiki kondisi ekosistem pada berbagai DAS dilakukan dengan pendekatan fisik (pola keproyekan) harus digeser dengan melibatkan masyarakat untuk turut berperan dan bertanggung jawab menjaga sub DAS Batang Mesumai tetap lestari. Untuk itu perlu dilakukan konservasi partisipatif yang melibatkan masyarakat, mulai dari membangun ide/pendapat/gagasan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan, sehingga akan tercipta keselarasan pembangunan pembangunan pada aspek fisik, biologi, dan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam dan fungsi kearifan lokal di sekitar Sub DAS Batang Mesumai, dan merumuskan strategi komunikasi pemberdayaan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Batang Mesumai.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), FGD dan observasi lapangan. *Indepth interview* dilakukan terhadap informan yang terdiri atas tokoh-tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di sekitar Sub DAS Batang Mesumai, Pemerintah Desa dan Kecamatan serta aktivis NGO

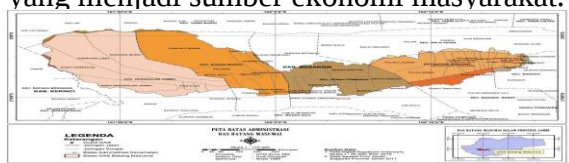
Informan didapatkan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*). Data dan informasi juga dikumpulkan dari laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, BPS dan dokumen lain yang relevan. Untuk memperoleh data, peneliti menekankan interaksi dialektis antara peneliti dengan sumber untuk mengkonfirmasi dari bacaan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Septermber hingga Desember 2022 di di Kecamatan Pangkalan Jambu. Lokasi merupakan Hulu dari Sub DAS Batang Mesumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan (Miles dan Huberman 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Biofisik DAS Batang Masumai

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Masumai (Gambar 1) dengan luas 64.851.11 Ha, mencakup wilayah administrasi Kabupaten merangin (99,89%) dan Kabupaten Kerinci (0.19%). Berdasarkan Peta Penggunaan Lahannya, terdapat luas lahan terbuka bekas pertambangan seluas 410.90 ha yang secara umum sebelumnya merupakan persawahan sehingga meskipun hanya dengan luasan 0.64% dari luas DAS telah berdampak terhadap keberlanjutan mata pencaharian Masyarakat. Hal ini disebabkan rusaknya badan air (Sungai) yang menjadi sumber air bagi irigasi sawah yang menjadi sumber ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Peta DAS Batang Mesumai

Berdasarkan hasil penelitian (Sunarti, et al, 2022) pada tanah bekas PETI diketahui bahwa tanah bekas PETI mempunyai kandungan bahan organik tanah yang lebih rendah, bobot isi tanah yang lebih tinggi, laju infiltrasi lebih rendah, dibandingkan tanah dengan tutupan kebun karet dan hutan (Tabel 1). Indikator sifat tanah seperti ini menunjukkan bahwa tanah bekas PETI mengalami degradasi. Rendahnya kandungan bahan organik tanah dan tingginya bobot isi tanah menunjukkan terganggunya fungsi kesuburan tanah. Sedangkan rendahnya laju infiltrasi menunjukkan terganggunya fungsi hidrologi tanah. Oleh karena itu, pemanfaatannya kembali (terutama untuk pertanian) memerlukan upaya pemulihan ataupun reklamasi.

Kelembagaan adat

Kelambagaan adat di wilayah studi masih sangat kuat. Sebagian besar keputusan-keputusan strategis diputuskan secara adat, seperti hak pengelolaan hutan adat, perizinan dan pelarangan penggunaan hutan, masyarakat umumnya masih sangat patuh dengan norma adat-istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang, masyarakat sangat patuh kepada aturan-aturan adat dan menghormati tokoh-tokoh adat. Selain norma adat, mereka juga patuh terhadap lembaga pemerintahan desa.

Kedua lembaga kepemimpinan tersebut berjalan seiring atau saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing. Namun memang secara norma masyarakat lebih mendahulukan etika adat-istiadat sebelum masuk ke pemerintahan formal, dan pemerintahan desa itu sendiri mengakui hal tersebut yang mana nilai-nilai adat dan kearifan lokal memang harus didahulukan. Pemerintahan desa lebih kepada menjalankan fungsi administratif wilayah sementara lembaga adat berfungsi terkait melestarikan kearifan lokal, budaya dan pranata sosial yang ada.

Hutan Adat Sebagai Penyangga Sub DAS Batang Mesumai.

Hutan Adat Desa (HAD) di Pangkalan Jambu sesuai SK Bupati Sarolangun Bangko Nomor 225 Tahun 1993 Tanggal 15 Juni 1993 memiliki luas 753,74 Ha. Menurut pemuturan tokoh adat, wilayah Hutan Adat tersebut diyakini oleh warga merupakan lintasan Datuk Rajo Bujang (sebutan untuk penunggu Gunung Batuah). Dahulu masyarakat meyakini bahwa kawasan hutan adat tersebut memiliki kekuatan magis sehingga tidak dijamah oleh masyarakat. Kekuatan tersebut seperti: jika ada warga yang mengambil kayu atau hasil hutan lainnya, maka yang bersangkutan akan ditimpa marabahaya seperti ditimpa kayu, sakit, ataupun akan mati hanyut dibawa arus sungai, gerimis akan turun seketika, jika ada orang baru masuk ke wilayah. Oleh karena itu, Hutan Adat tidak diganggu oleh masyarakat.

Pasca ditetapkan menjadi Hutan Adat oleh SK Bupati, disepakati hak dan kewajiban masyarakat terkait Hutan Adat ini. Hak Masyarakat yakni : (1) Mengambil benih dan bibit tumbuhan untuk kepentingan pengayaan dari dalam kawasan hutan untuk dibudidayakan, (2) Memanfaatkan potensi hutan sebagai tempat rekresasi sekaligus belajar, (3) Memungut hasil hutan berupa bahan baku ramuan obat tradisional tanpa memusnahkan jenis sumber obatan tersebut.

Selanjutnya untuk menjaga kelestarian hutan, masyarakat berkewajiban sebagai berikut : (1) Tidak menebang pohon serta memusnahkan jenis tumbuhan sumber makanan satwa secara liar serta jenis tumbuhan induk sebagai sumber benih tanaman budidaya, (2) Tidak membunuh binatang yang hidup dan berkembang biak dalam hutan dan dalam kawasan hutan disekitarnya, kecuali binatang tersebut mengancam dan merugikan hajat hidup orang banyak, (3) Memelihara, menjaga, memperbaiki dan menghormati patok batas fungsi hutan adat desa dan batas tetap hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, (4) Tidak membuka dan menggarap perladangan baru serta perluasan lahan budidaya dan

membangun pemukiman tetap di dalam hutan, (5) Tidak melakukan kegiatan pembakaran, baik di dalam maupun di pinggir kawasan hutan, (6) Tidak membuang sampah yang tidak dapat dihancurkan dan tidak menggunakan cairan beracun dalam melakukan semua kegiatan di dalam kawasan hutan, (7) Menjaga dan memelihara sumber-sumber mata air dan hulu sungai dalam kawasan hutan adat desa (Sardi, 2010).

Hak dan kewajiban masyarakat tersebut memiliki pesan moral atau etika lingkungan yang sangat baik untuk memproteksi praktik-praktik ilegal logging yang berdampak pada krisis ekologis di hutan dan sungai.

Pembukaan hutan untuk dijadikan areal pemukiman dan lahan pertanian merupakan dua aktivitas yang mendasari pemanfaatan hutan oleh masyarakat Desa. Kerangka ideologis pengelolaan hutan adat ke depan harus dibangun dengan melihat fungsi dan kepentingan pengelolaan hutan yang sudah harus mengarah ke aspek yang memuat fungsi multi dimensi aspek yaitu fungsi konservasi, ekonomi, dan sosial. Secara konservasi, kawasan hutan adat merupakan media dalam mempertahankan sumberdaya hutan dan mencegah bencana alam banjir dan tanah longsor. Secara ekonomi, kawasan hutan adat yang dikelola secara baik dan benar mampu menjadi salah satu sumber pendaptan asli desa dan meningkatkan pendapatan warga sebagai dampak secara langsung dari pengelolaan seperti mengembangkan tanaman rotan dan menjualnya secara tidak langsung sebagai bentuk kompensasi dari pengelolaan hutan adat seperti berkembangnya sumber mata pencaharian baru karena banyaknya pengunjung yang datang ke kawasan hutan adat dan sebagainya. Secara sosial, keberadaan hutan adat yang dikembangkan salah satunya menjadi obyek wisata dan laboratorium (media riset) akan meningkatkan proses interaksi warga dengan pihak luar.

Hutan Adat merupakan Kearifan Lokal Desa warga Pangkalan Jambu

berdasarkan ciri dari kearifan lokal menurut Santosa (2012) yaitu:

- a. Hutan Adat mampu bertahan terhadap budaya luar yakni tetap dipertahankan warga desa dari kegiatan PETI sebab berdasarkan letak teritorinya yang berada disepanjang sungai
- b. Hutan Adat mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar misal seperti penebangan liar yang marak terjadi
- c. Hutan Adat mampu mengintegrasikan unsur budaya asing ke dalam budaya asli yaitu tetap menjaga Hutan Adat guna menjaga keseimbangan ekosistem di Desa Baru Pangkalan Jambu
- d. Hutan Adat mempunyai kemampuan untuk mengendalikan salah satunya keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam berupa air dan kayu
- e. Hutan Adat mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Mengenai keberadaan dan pelestarian hutan adat Desa Baru Pangkalan Jambu, Ibu Kasnidar mengungkapkan:

“Hutan Adat tu adonyo jauh di dalam sekitar 7 Km. Kalo untuk luasnyo tu sekitar 700 km². Kalo yang biasonyo kami manfaatkan tu aeknyo untuk sawah ni samo kayu”

“Hutan Adat itu berada jauh di dalam hutan dari desa sekitar 7 Km. Jika luas Hutan Adat sekitar 700 Km². Yang biasa kami manfaatkan dari hutan adalah air untuk sawah dan kayu”.

Keberadaan hutan adat sangat dijaga oleh masyarakat sekitar terutama para petani padi sawah yang memanfaatkan aliran air guna mengairi sawah. Bapak Irhamna mengatakan bahwa hutan adat telah ada sejak zaman nenek moyang pada zaman dahulu sehingga tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya hingga kini dengan menerapkan norma-norma dan aturan-aturan guna menjaga keberadaannya.

Pemanfaatan Hutan Adat berbasis tujuan dan prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas akan membentuk tiga fungsi hutan adat yang meliputi: (1) *Fungsi Konservasi*, yaitu hutan adat merupakan

suatu kawasan perlindungan sumberdaya alam dan perlindungan terhadap kualitas lingkungan yang meliputi aspek: pelestarian plasma nutfah (flora dan fauna), mempertahankan tata air, pengendali polusi, (2) *Fungsi Ekonomi*, yaitu suatu hutan adat yang dikelola diarahkan untuk memberikan nilai secara ekonomis baik dalam pemenuhan kebutuhan individual (bersifat temporal) maupun kebutuhan kolektif (pembangunan desa), dan (3) *Fungsi Sosial*, yaitu suatu hutan adat yang dikelola diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan sosial yang meliputi: tempat pengembangan kegiatan-kegiatan penelitian, tempat wisata atau rekreasi, dan tempat penyelenggaraan upacara-upacara ritual yang menjadi keyakinan dan tradisi bagi masyarakat desa.

Berdasarkan fungsi Hutan Adat, menurut Suryono (2012) fungsi kearifan lokal antara lain:

- a. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam yakni hutan adat memberikan sumber daya alam yang sangat melimpah untuk masyarakat Desa Pangkalan Jambu yaitu penyediaan air dan sumber kayu serta udara bersih.
- b. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan yaitu hutan adat dipercaya masyarakat sekitar sebagai rahmat Tuhan yang patut dijaga dan dilestarikan sehingga berlaku pantangan-pantangan maupun larangan untuk menjaga hutan adat salah satunya yaitu penebangan pohon secara liar dan dilarangnya menambang emas di hutan adat.

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sub DAS Batang Mesumai

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Pangkalan Jambu, khususnya di Desa Tiga Alur, Bukit Perentak dan Baru Pangkalan Jambu memiliki adat istiadat yang relatif sama, karena masih memiliki keturunan yang sama yakni suku Melayu Jambi. Warga di tiga desa ini memiliki

kearifan lokal yang penting dalam menjaga kelestarian alam.

Kearifan lokal dapat berwujud pengetahuan lokal yang dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu pragmatis dan supranatural. Bentuk pragmatik menyangkut pengetahuan tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam baik yang diakui sebagai milik sendiri, umum/kolektif, maupun aset pemerintah yang berakibat langsung pada perubahan *landscape* dan perubahan fungsi-fungsi dari komponen agroekosistemnya. Pengetahuan lokal dalam bentuk pragmatis yang dimiliki masyarakat Desa Tiga Alur, Bukit Perentak dan Baru Pangkalan Jambu, salah satunya yakni Pemulihan lahan bekas PETI atau biasa disebut masyarakat lokal dengan sebutan Nuko Lahan. Kegiatan ini merupakan pengetahuan lokal yang murni berasal dari masyarakat sekitar, dalam upaya memulihkan lahan di sekitar DAS. Lahan yang dipulihkan disebabkan oleh pertambangan emas yang dilakukan di lahan tersebut, menurut ibu Nurlaila selaku pencetus utama Nuko Lahan, kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 saat semua lahan telah ditambang sehingga tidak terdapat lagi lahan untuk berusahatani sehingga terjadi kesulitan ekonomi setelahnya, hal inilah yang menjadi motivasi ibu Nurlaila untuk melakukan pemulihan lahan.

Nuko Lahan secara tradisional dilakukan dengan cara: (1). Lahan bekas PETI tersebut diratakan dan batu-batu yang terdapat pada lahan dibenamkan kedalam dan di tutupi tanah sekitaran lahan tersebut; (2). Lahan dialiri air dari sungai melalui irigasi yang sudah difasilitasi pemerintah setempat atau mereka membuat saluran atau aliran dari berbagai sumber mata air terdekat; (3). Lahan didiamkan selama kurang lebih 2 – 6 bulan hingga menghasilkan lumpur yang siap ditanami padi; (4) Lahan siap untuk ditanam padi.

Seiring perkembangan teknologi, beberapa petani yang diawali oleh bapak Budriansyah melakukan pemulihan lahan secara modern dengan menggunakan alat

berat seperti ekskavator. Kegiatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2016, sehingga memudahkan petani dalam melakukan pemulihan lahan dan dapat mengerjakannya dalam waktu cepat.

Menurut penuturan warga, Pengalaman kegiatan Nuko Lahan sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil panen padi dibandingkan sebelumnya, yakni naik rata-rata dari 500 kg hingga 1 ton, hal ini disebabkan karena terjadinya perluasan areal sawah dengan meratakan pematang sawah sehingga menambah jumlah tanam padi dan lebih memudahkan petani dalam melakukan proses tanam hingga panen. Pengetahuan lokal berikutnya adalah, masyarakat telah menerapkan sistem terasering pada lahan persawahan sejak dari nenek moyang dan hingga kini terus dijaga.

Pengetahuan lokal dalam bentuk supranatural dapat ditelusuri melalui bentuk-bentuk dasar aturan/ norma yang dihasilkan oleh kepercayaan, agama, moral dan budaya masyarakat setempat. Pengetahuan lokal dalam bentuk supranatural yang diyakini masyarakat ialah Gunung Bertuah yang dipercayai dapat mengirimkan pesan akan balak atau bahaya yang akan terjadi. Pesan yang dikirimkan berupa hewan-hewan yang turun memasuki pemukiman warga seperti ikan yang besar yang menyangkut di jaring ikan milik warga maupun hewan-hewan liar seperti kera dan lain-lain. Saat warga menyadari akan pesan tersebut, maka tokoh adat akan mengadakan Gatik Jalan Tolak Balak atau tahlilan keliling yang dilakukan oleh masyarakat khusus untuk kaum laki-laki saja. Tahlilan dilakukan mengelilingi desa dan kaum wanita akan berdiam di rumah dengan menutup pintu serta jendela.. Salah satu wujud dari pengetahuana supranatural ini adalah, kearifan warga dalam menjaga Hutan Adat yang sangat dijaga ketat oleh warga desa Baru Pangkalan Jambu. Hutan adat ini berada pada 4-5 Kilometer kearah hulu dengan luas sekitar 700 Ha

Kegiatan berikutnya yang sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar saat terjadi banjir atau musim penghujan adalah

Nanggok Udang atau mencari udang di sungai, Nyalo yakni menjala ikan disungai serta Gintang yaitu merentangkan jaring selebaran sungai untuk menjaring ikan di sepanjang Sub DAS Batang Mesumai.

Kearifan lokal yang berkaitan dengan kegiatan usahatani, yakni *Barin*, yakni kegiatan gotong royong para petani saat menanam padi maupun saat panen. Baarin dilakukan secara bergantian dari petani satu ke petani lainnya yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan sekaligus saling memotivasi untuk terus berusahatani padi sawah.

Barin merupakan kearifan lokal yang murni berasal dari masyarakat sekitar. Menurut masyarakat sekitar, kegiatan *Barin* ini sudah dilakukan sejak dahulu yaitu saat masyarakat zaman dahulu atau nenek moyang secara tolong menolong dan bergantian melakukan pembukaan lahan dari hutan menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman, berusahatani hingga perladangan.

Barin adalah kegiatan tolong menolong atau arisan tenaga yang dilakukan secara bergantian oleh para petani. Kegiatan *Barin* sendiri terdapat 2 (dua) jenis yaitu *Barin* tenaga dan *Barin sen*. *Barin* tenaga adalah gotong royong petani bersama-sama dan bergantian secara bergilir, *Barin* tenaga ada saat sedang melakukan pemanfaatan lahan, menanam padi, panen, dan menggiling padi.

Barin Sen adalah sejenis arisan padi yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dijual dan uang hasil dari penjualan padi tersebut dapat dipakai oleh anggota *Barin* itu sendiri.

“Hasilnya tu kan dikumpul sekali setahun dibuka celengannyo. Hasil tu kan dikumpul sampe satu tahun gotong royong tu kan di jual, siapa yang nak beli”. (Wawancara dengan Bapak Haji Tajudin)

“Hasilnya itu dikumpulkan dalam waktu satu tahun sekali dan dibuka celengannya. Hasilnya itu dikumpulkan sampai satu tahun

gotong royong itu lalu dijual, siapa yang mau membeli”.

Menurut Suryono (2012) dalam fungsi kearifan lokal, Selain berfungsi dalam pengembangan sumber daya manusia, *Barin* juga berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan. Nilai budaya yang terkandung dalam kegiatan *Barin* antara lain kebersamaan, *Barin* mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan sekitar sehingga masyarakat saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Kebersamaan yang terjalin dalam *Barin* sekaligus melahirkan persatuan antar masyarakat. Manfaat *barin* berikutnya adalah olong menolong. Kegiatan *Barin* yang dilakukan secara bergantian dan terus menerus akan membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. selanjutnya kekeluargaan, *Barin* dapat mempererat hubungan dalam masyarakat sehingga tumbuh rasa kasih sayang dan persaudaraan. Seperti yang dituturkan ibu Tenti Sandria selaku pemilik lahan yang sangat membutuhkan *Barin*, yaitu:

“Kegiatan gotong royong ini sangat berpengaruh sekali ya, apalagi di desa kami ini sangat mengutamakan kayak gotong royong kerja sama saling membantu, itu sangat mempengaruhi sekali. Bahkan di desa tetangga yang tidak melakukan kayak gotong royong sampai sekarang lahan PETI itu belum bisa dimanfaatkan”.

Komunikasi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal untuk merestorasi Sub DAS Batang Mesumai

Komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan kajian komunikasi dalam kegiatan pembangunan yang menekankan pada pentingnya pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Sehingga proses-proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada proses yang bersifat transaksional dan interaktif dari pada linear (Indardi, 2016).

Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai kegiatan/ proyek pembangunan lebih menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki berbagai sisi kemanusiaannya, baik berupa keinginan, cita-cita, daya, nilai-nilai, budaya dan peradaban, dan sebagainya (Setyawati, 2019).

Dalam kaitannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (*social change*). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Dalam hal ini, komunikasi tak akan lepas dari konteks sosialnya, artinya proses komunikasi akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, dan pranata masyarakatnya (Nurudin, 2004).

Peran komunikasi dalam masyarakat dikemukakan secara lebih khusus oleh Dewey (Mulyana, 2002), bahwa masyarakat eksis melalui komunikasi, perspektif yang sama, budaya yang sama, muncul melalui partisipasi dalam saluran komunikasi yang sama. Melalui partisipasi sosial perspektif bersama dalam kelompok diinternalisasikan dan berbagai pandangan muncul melalui kontak dan asosiasi yang berbeda. Melalui interaksi atau komunikasi orang-orang dapat bertukar makna, nilai dan pengalaman dengan menggunakan simbol dan tanda.

Kartasmita (1996) memandang pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan yang berakar kerakyatan bertitik tolak dari pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya tersebut harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Menanamkan nilai-nilai modern seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, bertanggung jawab, pembaruan lembaga social, dan integrasiannya ke dalam pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya adalah pokok dari upaya pemberdayaan ini. Penting adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut diri dan masyarakat. Proses pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Peningkatan yang dituju tidak hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat: “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995).

Telah diungkapkan sebelum ini bahwa ada beberapa konsep dalam komunikasi pembangunan yang penting, diantaranya adalah peliputan pembangunan (*development reporting*), jurnalis pembangunan (*journalism of development*), komunikasi pendukung pembangunan (*development support communication*), periklanan pembangunan (*development advertising*), serta penyuluhan khususnya penyuluhan pertanian (*agricultural extension*). Berbagai konsep ini memiliki perannya masing-masing di dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Dalam konteks pengelolaan sub DAS Batang Mesumai, maka komunikasi pemberdayaan ditujukan pada upaya memproteksi semua tindakan yang mengarah pada kerusakan ekosistem sungai, seperti praktik ilegal logging dan PETI serta melakukan perbaikan atau

restorasi pada DAS yang sudah terdegradasi.

Aktor yang berkepentingan dan menjadi leading sektor dalam pemulihan sub DAS Batang Mesumai seperti Pemerintah Daerah, mesti mampu menjadi komunikator yang memberdayakan dengan memanfaatkan stakeholders lokal untuk menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Stakeholders yang berpengaruh di Desa wilayah studi adalah Kepala Desa dan Tokoh atau pemimpin adat atau biasa disebut Nenek Mamak. Peran pemimpin adat, berkaitan dengan pelestarian norma adat, peraturan adat, hukum adat sesuai dengan yang diturunkan oleh nenek moyang. Tokoh adat juga sebagai penyelenggara seluruh kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, sementara peran dari pemerintahan desa terkait masalah administrasi Kolaborasi antar kepemimpinan adat dan formal menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam pengelolaan sub DAS Batang Mesumai.

Pesan (message) yang harus menjadi konten dalam pemberdayaan masyarakat, utamanya terkait dengan isu ancaman krisis ekologi sungai, jika tidak muncul kesadaran dari setiap individu dan kelompok masyarakat untuk peduli terhadap keberadaan dan keberlanjutan sub DAS Batang Mesumai. Pesan berikutnya adalah tentang bagaimana upaya merestorasi sungai. Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002) restorasi sungai adalah bertujuan memperbesar kapasitas tampung sungai dan memperlancar aliran. Restorasi merupakan suatu upaya untuk mengembalikan sesuatu pada kondisi awal/semula. Restorasi Sungai mencakup pembentukan kembali kondisi suatu DAS yang menekankan pada keintegrasian faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi suatu DAS seperti interaksi antara manusia, lahan, tanah, air dan budaya. Menurut Maryono dalam Apriando (2015), terdapat lima konsep restorasi sungai meliputi (1) restorasi hidrologi (2) restorasi ekologi (3) restorasi morfologi (4) restorasi sosial ekonomi (5) restorasi kelembagaan dan peraturan.

Dengan merujuk kepada kearifan lokal serta keberadaan stakeholders maka pesan dalam komunikasi pemberdayaan dalam upaya pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan lahan, sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
2. Pemanfaatan pengetahuan local Nuko Lahan dalam pemulihan lahan ex PETI sebagai praktik baik dalam konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air
3. Pengelolaan vegetasi, terutama Hutan Adat Pangkalan Jambu berbasis kearifan local dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
4. Peningkatan kepedulian dan peran serta stakeholders secara partisipatif dan berkelanjutan, di mana mereka diharapkan ikut mempengaruhi dan terlibat dalam mengawasi inisiatif serta pengambilan keputusan pemulihan lahan dan pemanfaatan sumberdaya yang akan mempengaruhi pengelolaan Sub DAS Batang Mesumai;
5. Inisiasi dan Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi dalam pemulihan Sub DAS Batang Mesumai.

Komunikasi pemberdayaan yang diuraikan di atas, merupakan proses komunikasi partisipatoris (Mulyana, 2007). Model komunikasinya bersifat konvergen, yang berarti berusaha menuju pengertian yang bersifat timbal balik diantara partisipan komunikasi dalam perhatian, pengertian dan kebutuhan. Pendekatan komunikasi konvergen ini sangat efektif dalam perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat. Di samping itu, pendekatan ini akan meretas jalan tumbuhnya kreativitas dan kompetensi masyarakat dalam mengkomunikasikan gagasannya untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan dapat dilihat bahwa pada masyarakat terjadi proses *self-help* (menolong diri sendiri) untuk keluar dari anggapan bahwa tidak masalah sungai rusak atau tercemar, yang penting mendapat nilai materi yang besar dari praktik praktik yang merusak lingkungan. Tindakan komunikatif masyarakat dalam proses pemberdayaan memperlihatkan keberdayaan masyarakat dalam berkomunikasi yang menggerakkan mereka pada suatu kondisi kehidupan yang didasari oleh adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Berfungsinya kelompok-kelompok sosial menjadi ruang-ruang publik bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berekspresi, sehingga menumbuhkan emansipasi dan solidaritas di kalangan masyarakat.

Kelompok sosial sebagai wadah paling efektif untuk pemberdayaan di tingkat komunitas yang memungkinkan individu untuk mengorganisir diri dalam kelompok tersebut (*collective self-empowerment*) sehingga terjadi suatu dialog yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran berkomunikasi dan solidaritas kelompok. Masyarakat menjadi pihak yang aktif dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dalam proses belajar dan diinternalisasikan dalam tindakan komunikatif mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. 1995, Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta
- Indardi, 2016. Komunikasi Pemberdayaan. UNPAD Pers. Bandung
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan*. Jakarta: BPPN
- Kodoatie, Robert J. dan Sugiyanto, 2002. Banjir -Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. (2004). Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saefatu, 2023. Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bagian Hilir Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Jurnal Geografi Vol 19 No. 2
- Sardi, I. 2010. Tinjauan Sosiologi Lingkungan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Universitas Jambi.
- Setyowati Y, 2019. Komunikasi Pemberdayaan Sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol 17, No. 2